



RENCANA STRATEGIS

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
TAHUN 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) PPN Palabuhanratu tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan agar membuat Renstra sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 tahun, yang disusun mengacu kepada pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.

Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen Renstra ini. Semoga perikanan tangkap Indonesia semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan.

Palabuhanratu 12 Februari 2020

Kepala Pelabuhan,



Ir. Ririn Sugihariyati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A Kondisi Umum	2
B Tugas dan Fungsi.....	3
C Potensi dan Permasalahan	5
D Lingkungan Strategis	6
BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN	
A Pembangunan Nasional	9
B Pembangunan Kelautan dan Perikanan	11
C Pembangunan Perikanan Tangkap	12
D Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	16
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	19
B Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	24
C Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap	30
D Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan PPN Palabuhanratu.....	50
BAB 4 INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A Target Kinerja	52
B Kerangka Pendanaan	56
BAB 5 PENUTUP	
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Kinerja Renstra UPT PPN Palabuhanratu.....	59
Lampiran 2: Perjanjian Kinerja PPN Palabuhanratu Tahun 2020.....	61

BAB 1 | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

A. Kondisi Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatar belakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dan diresmian pada tanggal 18 Februari 1993 oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu.

Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2009 terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 43 Ha (empat puluh tiga hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 72,60 Ha (tujuh puluh dua koma enam puluh hektar) serta Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 1.381,4 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh satu koma empat hektar) dan Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 3.969 Ha (tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan hektar).

Secara geografis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu terletak pada posisi 06^o 59' 47,156" LS dan 106^o 32' 61,884" BT, merupakan daerah pesisir Selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mempunyai posisi yang strategis, sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pelabuhan perpedoman kepada peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER/08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

a. Fungsi Pemerintahan

- 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- 10) Pemantauan wilayah pesisir;
- 11) Pengendalian lingkungan;
- 12) Kepabeanan; dan/atau
- 13) Keimigrasian.

b. Fungsi Perusahaan

- 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) Pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan;

- 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) Wisata bahari; dan/atau
- 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

1.2.1. SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN

Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

1.2.2. SEKSI KESYAHBANDARAN

Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.3. SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi, pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, pelayanan jasa, dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

1.2.4. SUB BAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN), pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.

1.2.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPN Palabuhanratu dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mewujudkan pelabuhan perikanan sebagai salah satu kawasan Eco Fishing Port, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup DJPT yang berkaitan dengan kebijakan di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara implisit juga menjadi tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan.

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

- **Kelimpahan stok SDI;** Pemberantasan IUU Fishing, intensifikasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya pro-environment lainnya telah berhasil meningkatkan stok sumber daya ikan dalam 5 tahun terakhir. Secara faktual, nelayan di beberapa lokasi pun telah merasakan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan.
- **Potensi PUD;** Pengelolaan perikanan di PUD semakin dikembangkan dalam rangka menjaga baik kelangsungan sumber mata pencaharian maupun ketahanan pangan masyarakat. Pada beberapa lokasi percontohan telah dibentuk Sekretariat Pengelolaan, pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta penebaran benih ikan.
- **Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPP;** Sejauh ini seluruh kondisi prasyarat utama dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPP telah terpenuhi; mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun, penetapan dan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP), maupun penetapan mekanisme pengaturan lainnya.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- **Kapasitas nelayan;** Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan
- **Kesejahteraan nelayan;** Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca

- **Mindset masyarakat perikanan tangkap;** Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan
- **Sarana prasarana usaha penangkapan ikan;** belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien
- **Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha;** belum jelasnya mekanisme pendataan nelayan kecil, serta belum optimalnya integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, dan kurangnya intensifikasi penggunaan sistem IT

D. Lingkungan Strategis

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

Tabel . Matriks SWOT Kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi di bidang pengembangan perikanan dan kelautan dan didukung oleh keberadaan PPN Palabuhanratu; ▪ PPN Palabuhanratu merupakan sentra perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan yang sudah optimal dimanfaatkan sehingga tidak ada lagi lahan pengembangan yang dapat dikembangkan; ▪ Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang kurang memadai, sehingga menghasilkan capaian kinerja belum optimal;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki sarana dan prasarana penunjang perikanan tangkap yang lengkap; ▪ Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab; ▪ PPN Palabuhanratu memiliki komoditi ekspor berupa ikan ekonomis penting seperti Tuna yang menjadi salah satu produsen Tuna di Indonesia; ▪ Jarak geografis PPN Palabuhanratu yang dekat dengan kota-kota besar sebagai sentra ekonomi Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap, terutama dermaga dan kolam pelabuhan; ▪ Terbatasnya anggaran pembangunan / peningkatan dan pemeliharaan fasilitas.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya lahan untuk rencana pengembangan pelabuhan yang masih dalam proses pembebasan lahan; ▪ Palabuhanratu telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di wilayah Jawa Barat; ▪ Potensi Sumber Daya Ikan di WPP 573 mencakup perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga 	<p>SO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PPN Palabuhanratu mempunyai letak yang strategis sehingga mobilitas dalam mendukung produksi perikanan tinggi; ▪ Ekspor ikan ekonomis penting disebabkan oleh potensi sumberdaya ikan yang besar sehingga diperlukan data dan pusat informasi pelabuhan yang akurat agar perikanan dapat dimanfaatkan 	<p>WO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan dapat diperluas sehingga dapat dikembangkan dan dioptimalkan; ▪ Anggaran yang diberikan dapat meningkatkan dan memelihara fasilitas; ▪ Pegawai dapat meningkatkan kemampuan / skill dari pelatihan dan bimtek yang diberikan.

<p>sebelah Selatan Nusa Tenggara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya anggaran pembangunan / peningkatan dan pemeliharaan fasilitas; ▪ Adanya pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai 	<p>secara bertanggungjawab.</p>	
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material yang dibawa oleh Sungai Cipalabuhan bermuara ke kolam pelabuhan mengakibatkan sedimentasi kolam pelabuhan; ▪ Cuaca ekstrem yang terjadi pada saat-saat tertentu berpotensi merusak fasilitas pelabuhan; ▪ Jalan akses ke Palabuhanratu dan jalan antar wilayah masih didominasi oleh jalan dengan ruas jalan yang sempit dan kondisi jalan kurang memadai; ▪ Resistensi masyarakat sekitar terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan cukup tinggi; ▪ Pelaku usaha yang bergerak pada bidang perikanan didominasi oleh pengusaha kecil; ▪ Minimnya diversifikasi produk olahan dari hasil perikanan. 	<p>ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan keterampilan dan keahlian pelaku usaha penangkapan ikan; ▪ Adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, PPN Palabuhanratu dapat dikelola dengan baik; ▪ Melalui data dan pusat informasi tadi diharapkan masyarakat dapat mengerti kebijakan ataupun peraturan yang dibuat. 	<p>WT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan dan memperkuat koordinasi lintas sectoral; ▪ Meningkatkan kompetensi SDM yang berbasis teknologi informasi.

BAB 2 | VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Pembangunan Nasional

Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2020-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal

- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. **Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP**, yakni:
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap

- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategi, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);

- b. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
 - Nilai PNBP SDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
 - Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);
 - c. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
 - Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
 - Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
 - Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
 - Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);

- Jumlah alat penangkapan ikan da/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
 - Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
 - Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
 - Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
 - Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
 - Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
 - Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
 - Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
 - Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
 - Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
 - Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);
 - Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);
 - Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
 - Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:
- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:
 - Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
 - Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
 - b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
 - e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT TA.2019 (persen).

D. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan guna mendorong pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta memperhatikan lingkungan strategis yang bergerak dinamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah : **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sebagai pusat Pertumbuhan dan Pengembangan ekonomi perikanan terpadu”**.

Visi tersebut bermakna, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi terpadu yang strategis, produktif dan cepat tumbuh di selatan Jawa Barat sehingga menjadi salah satu pendukung penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2024.

Di dalam kawasan pelabuhan akan tumbuh berbagai aktifitas industri hulu sampai hilir (Pra Produksi), produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran) maupun ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, pemukiman serta fasilitas umum lainnya yang saling berintegrasi dan mendukung sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan setiap unsur yang terlibat di dalamnya atau masyarakat kelautan dan perikanan.

Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan memperlihatkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang di emban Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah:

- 1) Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
- 2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- 3) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
- 4) Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- 5) Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain yang beraktifitas di dalam pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi. Sehubungan

dengan hal tersebut, dengan mengacu pada Renstra DJPT Tahun 2019-2020, maka tujuan yang ingin di capai Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sampai dengan tahun 2020 adalah:

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan,
- 2) Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Sasaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Untuk itu, KKP akan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk meningkatkan konstruksi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan nasional, yang membawa *multiplier effect* sebagai *prime mover* perekonomian nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, sasaran yang ingin dicapai Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2020-2024) adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan dengan indikator sasaran makro adalah pencapaian standar pelayanan prima dalam operasional pelabuhan perikanan dengan fasilitas produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembenahan alur dan kolam pelabuhan serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, pelayanan prima serta dengan memperhatikan potensi Sumberdaya ikan, maka sasaran strategis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) ke depan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta); dan
 - c. Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)
2. Sasaran strategis pertama (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :
- a. Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan adalah 100 % pada tahun 2024;
 - b. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - c. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah 100 % pada tahun 2024;
 - d. Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang);
 - e. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang);
 - f. Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (lokasi);
 - g. Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah 100 % pada tahun 2024;
 - h. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nelayan); dan
3. Sasaran strategis pertama (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional dan berintegritas”, dengan Indikator Kinerja :
- a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)
4. Sasaran strategis pertama (SS-4) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :
- a. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah 100 % pada tahun 2024;
 - b. Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah 100 % pada tahun 2024;
 - c. Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah 100 % pada tahun 2024; dan
 - d. Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nilai).
5. Sasaran strategis pertama (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel”, dengan Indikator Kinerja :
- a. Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah 89 pada tahun 2024.

BAB 3 | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita di atas dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi, Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat serta mengembangkan infrastruktur klaster kelautan-perikanan.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, agenda pembangunan Indonesia ke depan diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang juga telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dijabarkan dalam kerangka pikir sebagaimana **Gambar 3.1** dan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Kegiatan kelautan dan perikanan yang mendukung agenda memperkuat ekonomi, diantaranya melalui program prioritas peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, program prioritas peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan program prioritas ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1)

Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

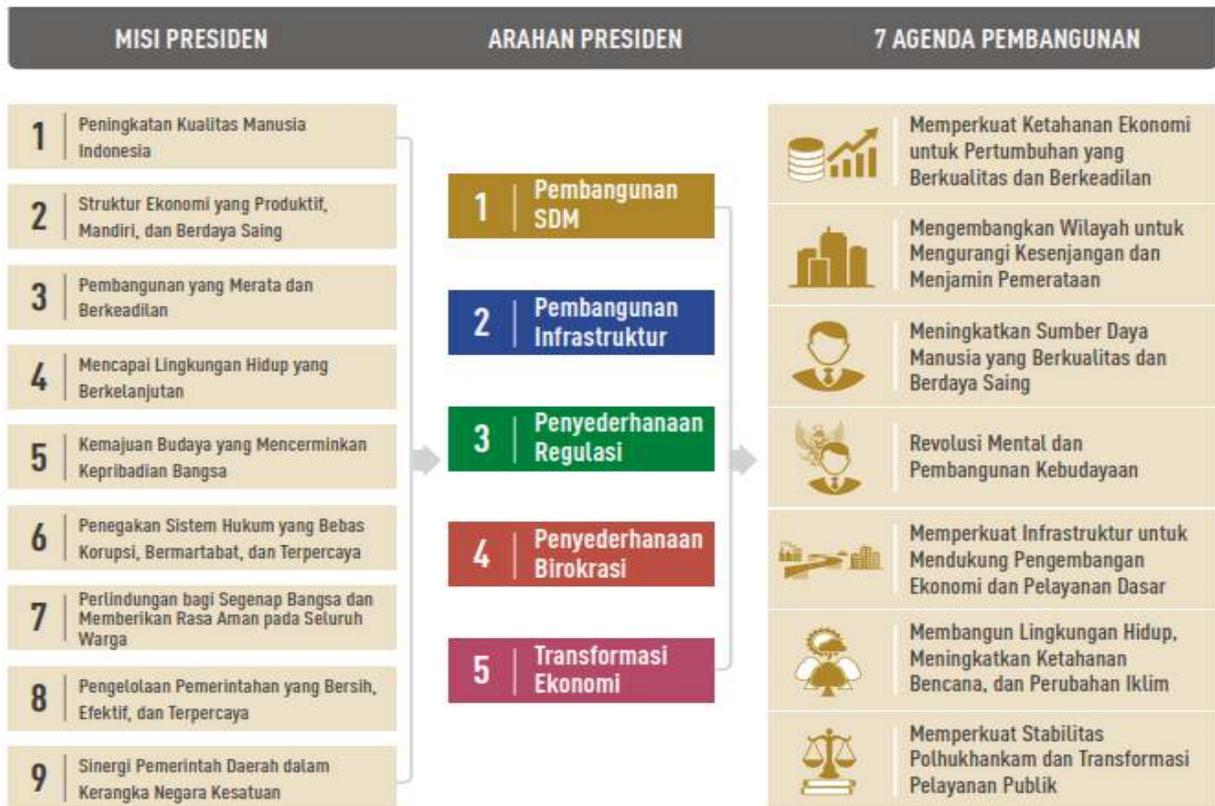
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3)

Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



Gambar 3.1. Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Nasional

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. *Major Project* yang diamanatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain: 1) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng; dan 2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pada **Gambar 3.2**. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendukung *Major Project* lain diantaranya: 1) 10

Destinasi Pariwisata Prioritas; dan 2) Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	25 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 3,3 Swasta: 21,7 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 	30 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 7,2 KPBU dan Swasta: 22,8 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Gambar 3.2. Major Project pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Berdasarkan jbaran 7 Agenda Pembangunan Nasional dan *Major Project* di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*),

dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, serta industrialisasi.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut sesuai dengan perkembangan pembangunan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM)

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas,

peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
- b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
 - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
- c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
 - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
- d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.
- e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
 - 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
 - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
 - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.

2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias
 - e. Pengembangan budidaya rumput laut
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
 - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
 - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
 - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
 - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
 - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
 - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - q. Penguatan UPT perikanan budidaya

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Startegi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
 - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
 - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
 - f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
 - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
 - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
 - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)

- k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
 - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
 - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
 - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
 - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
 - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
 - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
 - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
 - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
 - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
 - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
 - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
 - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
 - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
 - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
 - bb. Penguatan UPT
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
 - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
 - d. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - e. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - f. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
 - g. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
 - h. Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
 - i. Pengelolaan Biofarmakologi
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - k. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut

- l. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - m. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
 - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
 - q. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - r. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - s. Penyadarytahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - t. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - u. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
 - v. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
 - w. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
 - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
 - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
 - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
 - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Indek SPBE
 - c. Level maturitas SPIP
 - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
 - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7

prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem

perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 **“memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** dan agenda 2 **“mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”**. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

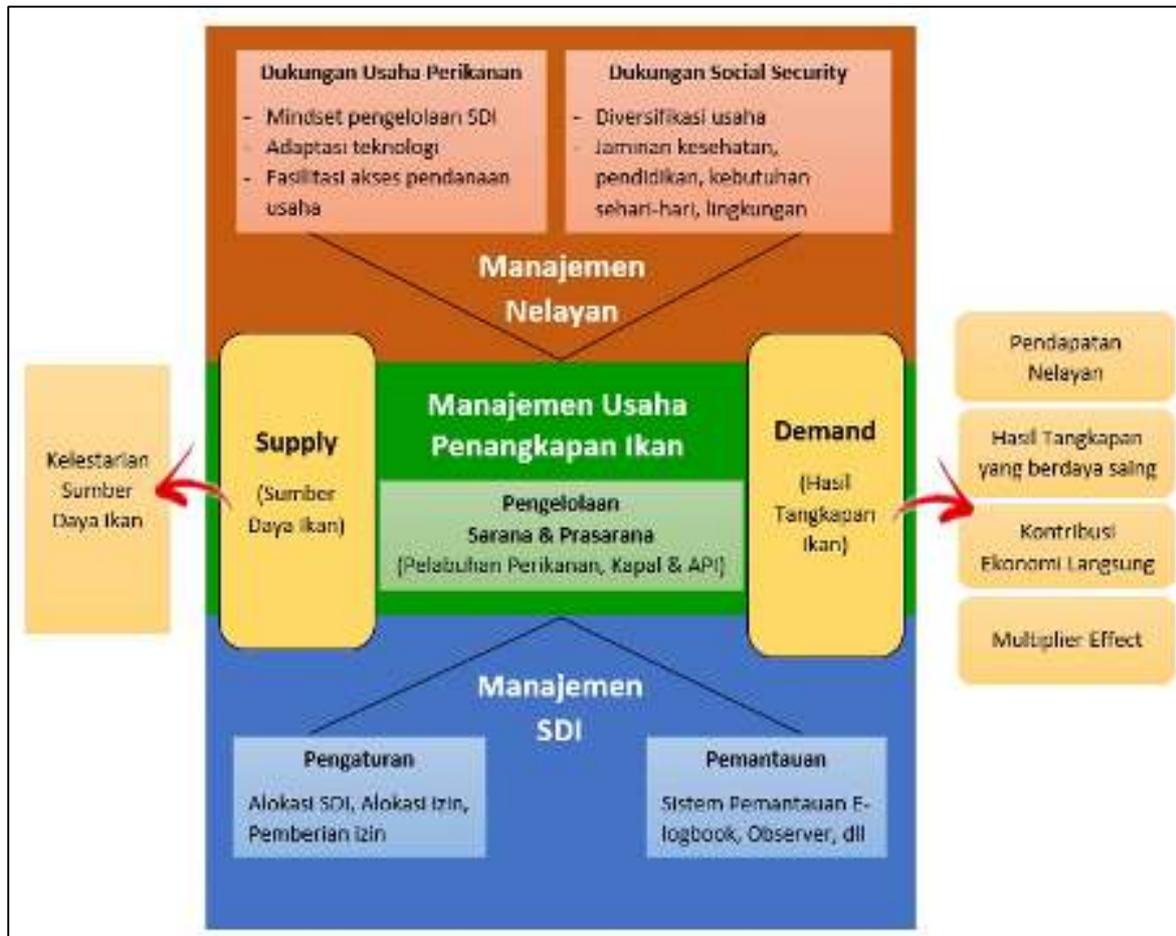
Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3.1**). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.3. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 3.4. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

1. Kebijakan Pokok

a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan

tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ika dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; 4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;

- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan; 2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); 3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah; 4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) **Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)**

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya

pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>); 2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP; 3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.

4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan

penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari,

kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan database kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta; 2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif; 3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Demaga Pelabuhan / air bersih	Penyulapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Lahan Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D- sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembantuan / Pembiayaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Peningkatan GT, dukungan kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, dana nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 3.5. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

2. Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap

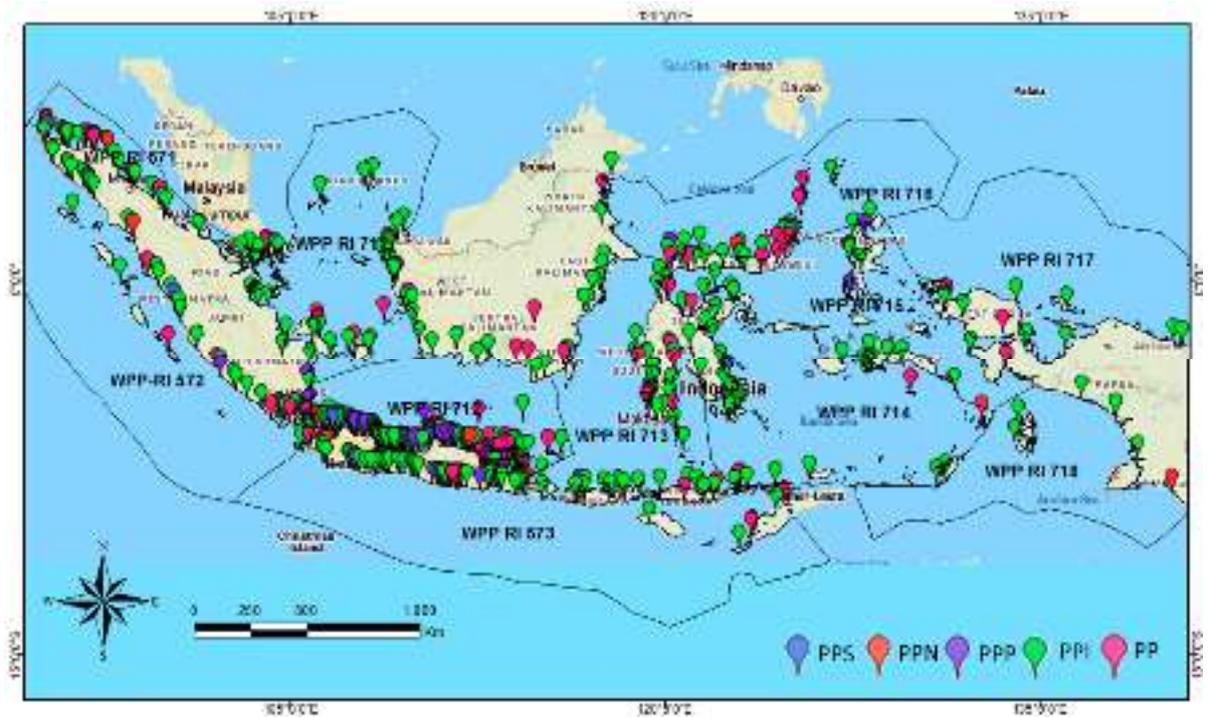
Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal, penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

Indikasi Pembangunan Kewilayahan

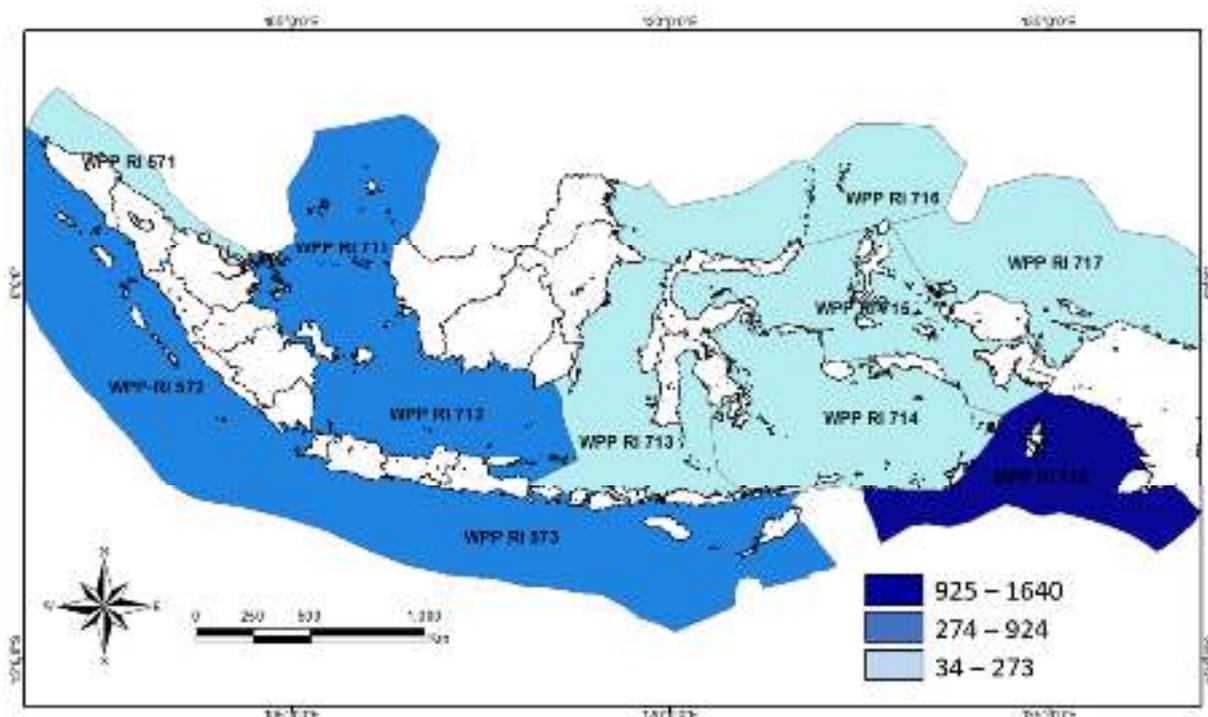
Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPP; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPP, produksi komoditas TCT per WPP, serta produksi komoditas utama per WPP.



Sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP

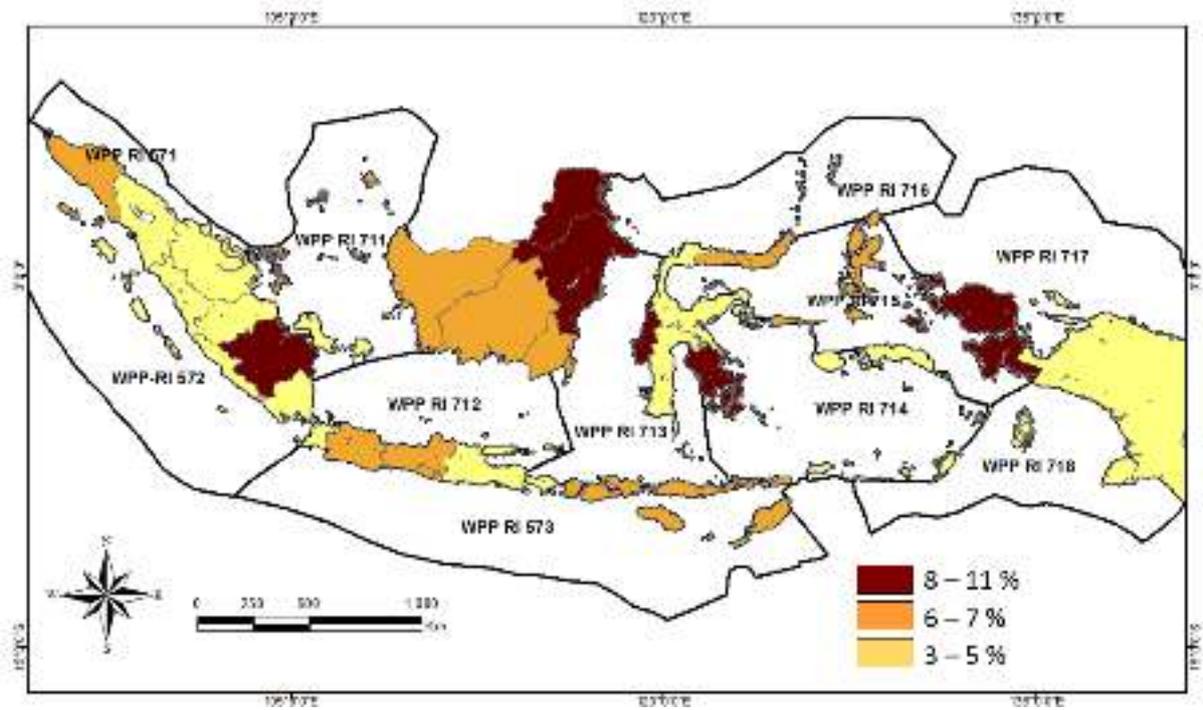


Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPP (per September 2019)

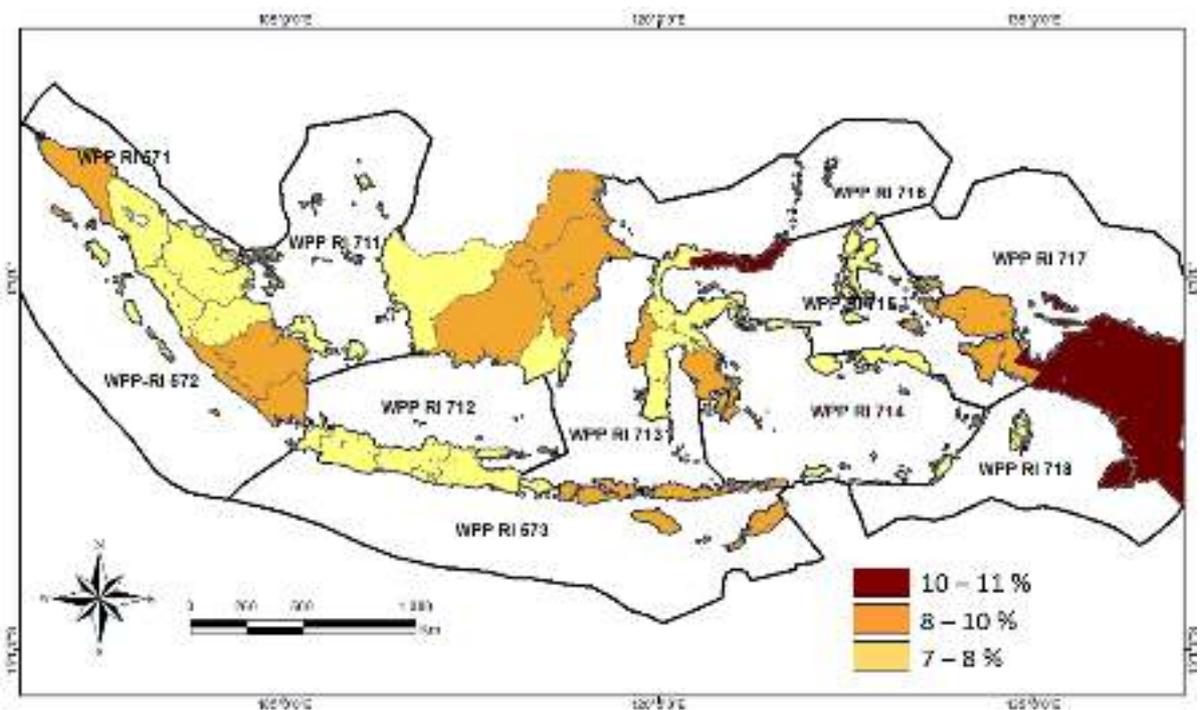




Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024

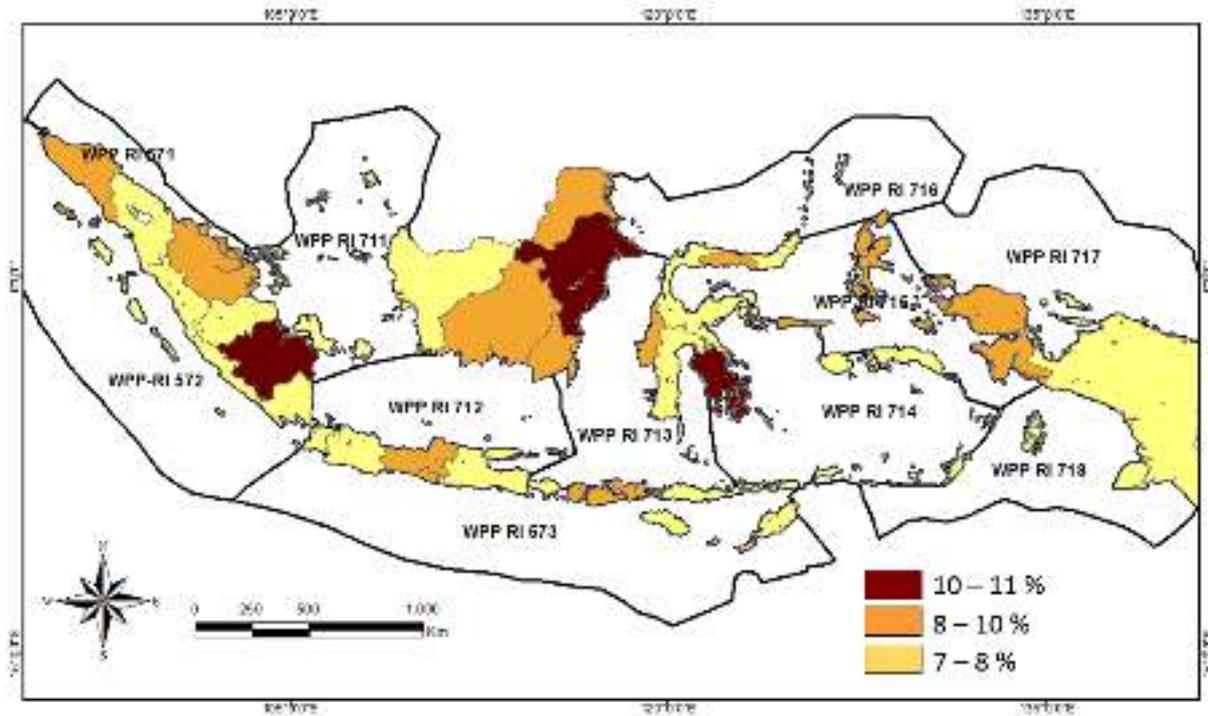


Proyeksi Pertumbuhan Nilai Produksi per Provinsi 2020-2024

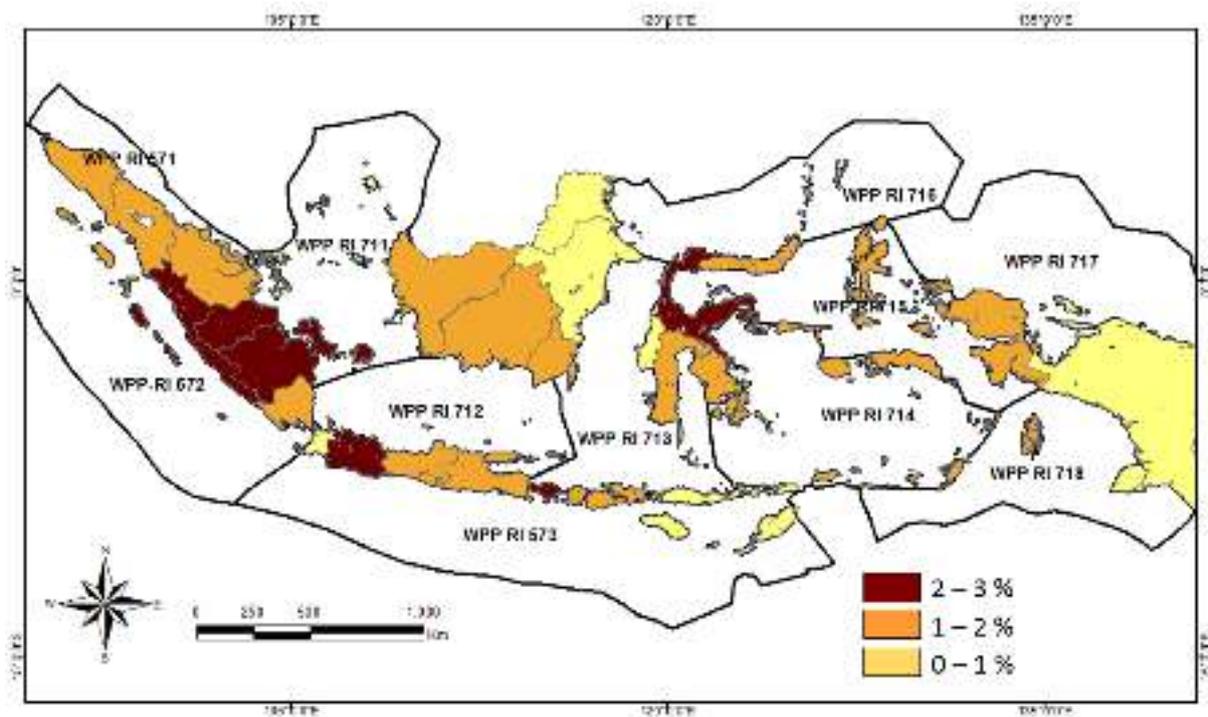




Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Nelayan per Provinsi 2020-2024

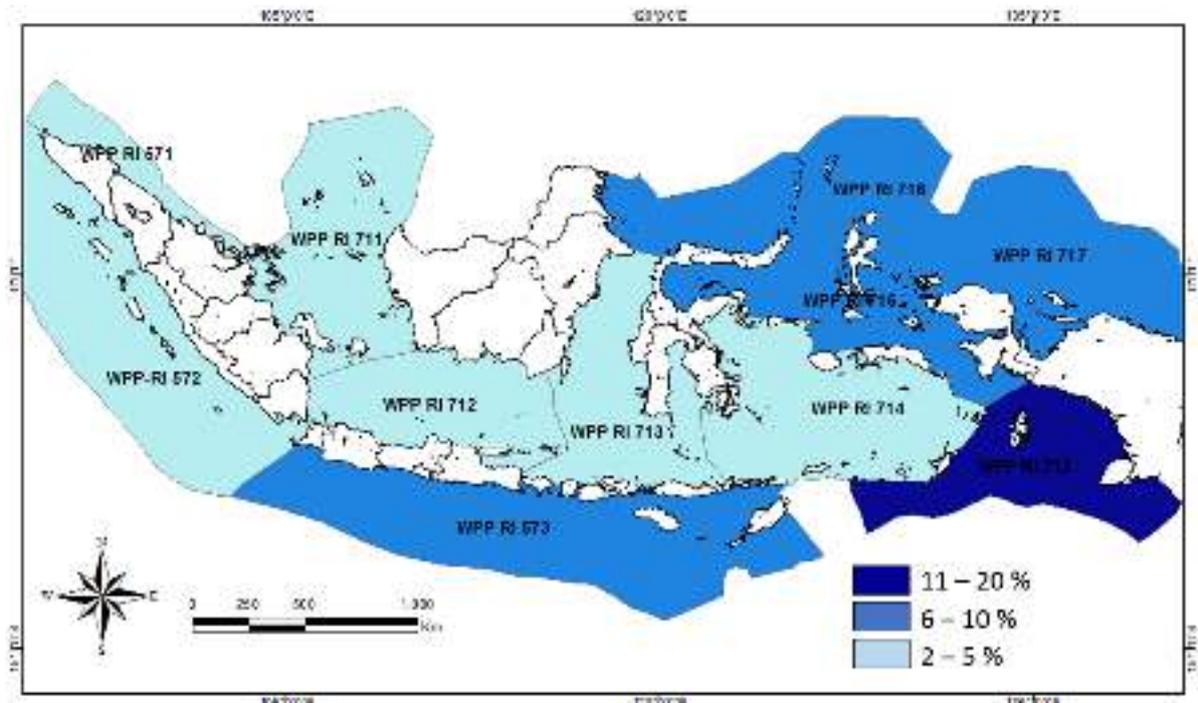


Proyeksi Pertumbuhan NTN per Provinsi 2020-2024

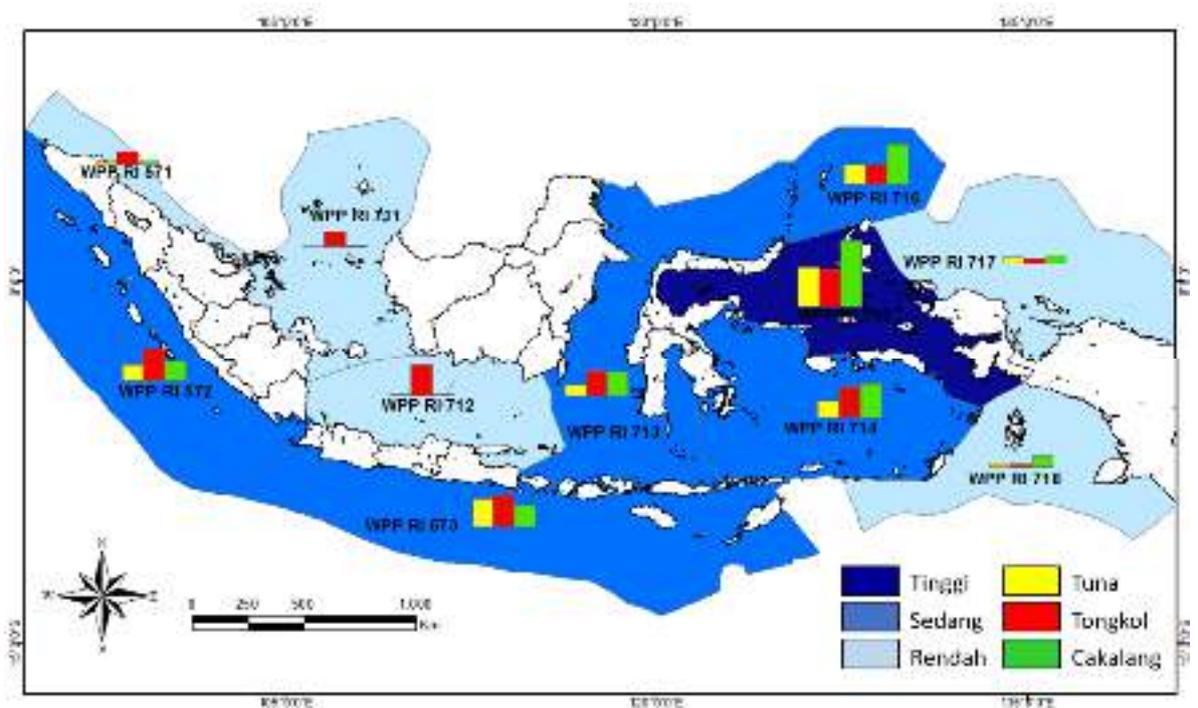




Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per WPP 2020-2024

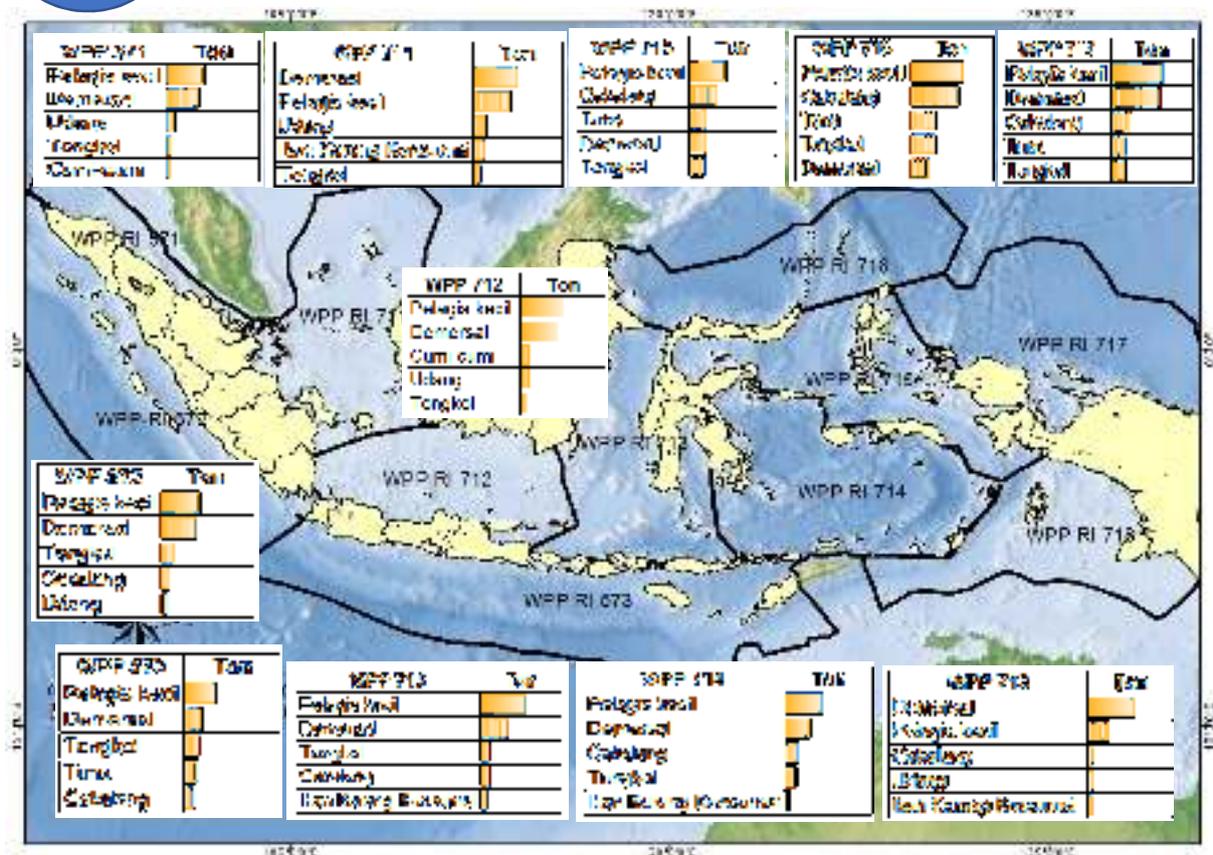


Proyeksi Produksi Komoditas TCT per WPP 2020-2024





Proyeksi Produksi Komoditas Utama per WPP 2020-2024



Kerangka Regulasi

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang perikanan tangkap, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri perikanan tangkap nasional. Adapun beberapa regulasi yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan selama periode 2020-2024 sesuai dengan **Lampiran 1**.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

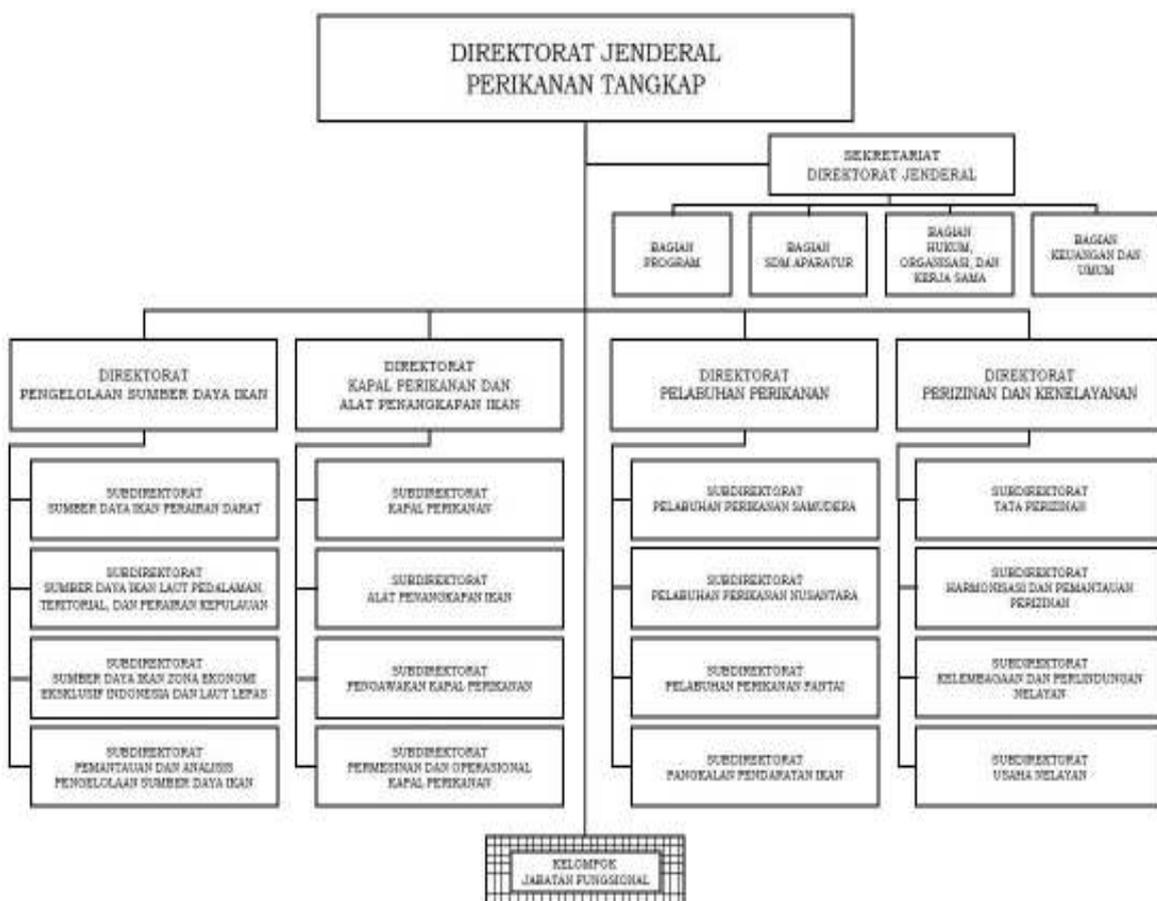
Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan dengan memperhatikan perubahan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.

2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Mengacu pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, terdapat beberapa usulan penyempurnaan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan berdasarkan substansi pengelolaan pelabuhan perikanan, meliputi: Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, serta Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan; dan
2. Optimalisasi fungsi Subbag TU sebagai unit kerja kesekretariatan di lingkup direktorat yang menangani koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.



Gambar 3.6. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Kebijakan dan Strategi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam statusnya sebagai UPT Pusat yang operasionalnya berada di daerah, maka arah dan kebijakan organisasi diupayakan untuk senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Guna mewujudkan sasaran persentase pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima dalam operasional pelabuhan perikanan dengan fasilitas produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar, maka kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam kurun 2 (dua) tahun ke depan adalah melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan terhadap pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan; fasilitas dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; fasilitas publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan, maka upaya peningkatan pelayanan terhadap aktifitas tersebut terus diupayakan secara optimal.

Kebijakan PPN Palabuhanratu dalam peningkatan pelayanan tersebut ditempuh antara lain melalui upaya penerapan *Standar Operation Procedure (SOP)*; peningkatan kapasitas SDM pelabuhan melalui diklat, bimtek, dll; penyediaan peralatan pendukung pelayanan, pemasangan papan penerangan/informasi pelayanan, penyebaran data dan informasi tepat sasaran, pertemuan dengan *stake holders* melalui kegiatan *coffee morning* dan diskusi langsung dilapangan; dan sosialisasi ketentuan/peraturan yang terkait dengan pelayanan kepelabuhanan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan

Guna mewujudkan PPN Palabuhanratu upaya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan terus diupayakan secara optimal untuk memfasilitasi seluruh kegiatan pelayanan kepelabuhanan, sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan maupun usaha pendukung lainnya mulai dari pra produksi, produksi sampai pasca produksi, sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, perkembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut meliputi penyempurnaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan antara lain : pematangan lahan pelabuhan, MCK, IPAL, cold storage dan docking kapal, sarana perbengkelan, Retaining Wall,

jalan akses menuju dock kapal, pengerukan kolam dan alur pelabuhan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan fasilitas operasional lainnya juga akan senantiasa memperoleh perhatian secara proporsional.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan

Kebijakan pengembangan system informasi perikanan diarahkan pada peningkatan kualitas, akurasi data sebagai informasi perikanan di PPN Palabuhanratu dengan beberapa ragam penyampaian informasi baik dalam bentuk buku statistik, leaflet maupun poster dengan pengembangan jejaring distribusi informasi diantaranya melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi, dan *visitor*.

Program Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan melalui 1 (satu) program yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan, yaitu: (1) Pengelolaan sumber daya ikan, (2) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, (3) Pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, (5) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil, dan (6) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Ditjen Perikanan Tangkap.

Program pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mengacu kepada kebijakan strategis Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penjabaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui 6 (enam) kegiatan tersebut, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang diamanatkan kepada Ditjen Perikanan Tangkap, yakni untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut : (1) meningkatnya volume dan nilai produksi perikanan tangkap, (2) meningkatnya pendapatan nelayan, (3) dan meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN).

BAB 4

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107
	2	Rata-rata pendapatan Nelayan (Rp/nelayan/bulan)	3.952.000	4.229.000	4.548.000	4.911.000	5.360.000
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	3	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan	4	Nilai PNBPN Ditjen Perikanan Tangkap (Rp. Miliar)	928,679	551,370	656,535	657,951	659,201
4. Tata kelola sumber daya perikanan bertanggung jawab	5	Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan dan WPPNRI (persen)	100	100	100	100	100

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat	6	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	8,020	8,421	8,881	9,434	10,105
		7	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp triliun)	231,311	247,677	266,459	289,167	316,805
		8	Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen)	100	100	100	100	100
6	Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik	9	Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)	A(85)
		10	Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker)	9	12	16	19	23
		11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	60	61	62	63	64
		12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	82	84	86	88	90
		13	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)					
	14 Batas tertinggi persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019 (persen)	1	1	1	1	1

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output).

Tabel. Indikator Kinerja Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	1 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.261	5.710	5.824	5.940	6.059
	2 Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	157.854	116,00	119,00	121,00	123,00
	3 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)	672.606	685.124	691.433	698.195	731.683
2 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di	4 Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan		Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)						
	5	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	100	102	105	107	110	
	6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (persen)	80	85	85	90	90	
	7	Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang)	130	132	135	137	140	
	8	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang)	20	25	30	35	40	
	9	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (lokasi)	1	1	1	1	1	
	10	Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		11	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nelayan)	50	55	60	65	70
3	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional dan berintegritas	12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	72	73	75	76	78
4	Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	13	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100
		14	Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100
		15	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100
5	Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel	16	Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, serta mencapai target sasaran utama yang telah

ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu merupakan Unit Pelaksana Teknis, maka pendanaan untuk mencapai target sasaran utama berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu dari Sekretariat, Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan dan Direktorat Sumber Daya Ikan.

Pendanaan dari Sekretariat digunakan untuk Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pendanaan dari Direktorat Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Tangkap digunakan untuk mendukung pelaksanaan cek fisik kapal dan sertifikasi buat kapal dan awak kapal, sedangkan pendanaan dari Direktorat Pelabuhan Perikanan digunakan untuk pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu untuk mendukung pelaksanaan penyebaran informasi, pelaksanaan tugas kesyahbandaran, pelaksanaan pelayanan di pelabuhan perikanan, pelaksanaan operasional pelabuhan lainnya. Pendanaan dari Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan dan Direktorat Sumber Daya Ikan digunakan untuk mendukung sasaran kinerja dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Secara rinci pendanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dapat dilihat pada lampiran.

BAB 5 | PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan mengacu pada Renstra Ditjen Perikanan Tangkap yang telah disesuaikan dengan perubahan pada visi, misi, strategi dan kebijakan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta merupakan acuan perencanaan setiap tahun.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dari dokumen renstra dimaksud dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dalam pengembangan PPN Palabuhanratu dan masyarakat luas.

Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari jajaran staf PPN Palabuhanratu dan seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap pada umumnya merupakan hal yang mutlak dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterahkan nelayan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan.

**LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA RENSTRA UPT PPN PALABUHANRATU PERIODE TAHUN 2020-
2024**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	1	Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.261	5.710	5.824	5.940	6.059
		2	Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	157.854	116,00	119,00	121,00	123,00
		3	Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)	672.606	685.12 4	691.43 3	698.19 5	731.68 3
2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan	4	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100	100	100	100	100
		5	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	100	102	105	107	110
		6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (persen)	80	85	85	90	90
		7	Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang)	130	132	135	137	140
		8	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang)	20	25	30	35	40
		9	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (lokasi)	1	1	1	1	1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		10	Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100
		11	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nelayan)	50	55	60	65	70
3	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional dan berintegritas	12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	72	73	75	76	78
4	Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	13	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100
		14	Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100
		15	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100	100	100	100	100
5	Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel	16	Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara



Ririn Sugharyati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
1	Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	1 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.261		
		2 Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Rp.juta)	157.854		
		3 Nilai PNRP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. juta)	672.606		
2	Terselenggaranya tata lola pengelolaan pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan	4 Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100		
		5 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	100		
		6 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (persen)	80		
		7 Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang)	130		
		8 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (orang)	130		
		9 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (lokasi)	1		
		10 Persentase Penyampaian Informasi perikanan pusat - daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100		
		11 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nelayan)	50		
		3	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, profesional dan berintegritas	12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	72
				4	Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
14 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100				
15 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIF Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100				
5	Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel	16 Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (nilai)	Raih (88)		

Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp 21.023.907.000,-

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


M. Zulficar Mochtar

Jakarta, 06 Januari 2020
Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu


Ririn Sugiharyati